

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Pengembangan BPP Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh dan pelaksanaan fungsi dan peran BPP sebagai pusat data, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai indikator dalam SOP Kostratani. Sedangkan BPP sebagai pusat konsultasi agribisnis dan pusat jejaring kemitraan belum dilaksanakan sesuai indikator dalam SOP Kostratani.
2. Pelaksanaan pengembangan Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh sudah di dukung oleh kegiatan IPDMIP tapi kelihatannya belum memberikan hasil yang memuaskan. BPP Kecamatan Payakumbuh baru mampu melaksanakan empat dari enam indikator BPP Kostratani pelaksanaannya belum optimal karena tidak adanya komitmen dari implementor di tingkat Kostrawil, Kostrada dan Kostratani di kecamatan. Pelaksanaan Kostratani belum di dukung kemampuan sumber daya berupa sumber daya manusia, dan fasilitas yang dimiliki oleh BPP
3. Permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh dapat dilihat dari empat aspek, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasinya. Pada aspek komunikasi, ditemukan bahwa dalam proses komunikasi tentang Kostratani dilihat dari segi transmisi, konsistensi dan kejelasan tidak berjalan dengan baik sehingga tidak terjalin koordinasi pada setiap lini aktor pelaksana Kostratani tersebut. Untuk aspek sumber daya, terlihat bahwa pelaksanaan Kostratani tidak didukung dengan fasilitas sumber dayanya, baik dari sumber daya manusia yang kurang, informasi tidak jelas, wewenang yang tidak dimiliki oleh BPP serta fasilitas yang belum memadai sehingga implementasi program Kostratani menjadi tidak efektif. Pada aspek disposisi, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan program Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh sikap para pelaksana

kegiatan dari tingkat Kostrada hingga kecamatan (Kostratani) tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan program sehingga menimbulkan hambatan-hambatan untuk tujuan pelaksanaan program. Sedangkan pada aspek struktur birokrasi, ditemukan bahwa SOP yang sudah ada tidak terlaksanakan dengan baik dan dengan adanya fragmentasi dalam implementasi Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh, menyebabkan struktur yang berlapis dan rentang kendali yang terlalu luas sehingga koordinasi antar aktor mulai dari camat, BPP, Kostrada dan Kostrawil tidak berjalan dengan baik yang berdampak pada implementasi Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh menjadi tidak berhasil. Hubungan keempat faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan koordinasi yang tidak terlaksana, sehingga Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota tidak berhasil diimplementasikan dengan baik dan termasuk pada *unsuccessful implementation*.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya memberikan pemahaman kepada para pelaksana baik di tingkat Kostrada, BPP Kostratani yaitu camat, penyuluh dan petani tentang Kostratani di BPP Kecamatan Payakumbuh agar fungsi BPP sebagai rumah penyuluh dan petani bisa terus digerakkan melalui aturan-aturan dan regulasi yang telah ditetapkan.
- 2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pelaksana Kostrada hendaknya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi atau pelaksanaan program Kostratani di daerahnya, khususnya di Kecamatan Payakumbuh. Secara normatif organisasi publik adalah lembaga yang dirancang memiliki sumber daya dan kapasitas untuk mengatasi sejumlah persoalan publik. Sehingga perlu adanya dorongan kepada pembuat kebijakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan diperlukan dalam rangka implementasi kebijakan program yang dibuat dalam hal ini Kostratani.

- 3) Perlu adanya dorongan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian pertanian dan dari penyuluh pertanian di BPP terhadap pimpinan daerah untuk mau mengambil langkah-langkah penguatan peran Kostratani dan melakukan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pemerintah pusat dan daerah sehingga pencapaian tujuan kegiatan lebih optimal.

